

ABSTRAK

Judul Tesis : Akibat Hukum dan Tanggungjawab Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris di Hadapan Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015.

Nama Mahasiswa : Yustika Ausie Fatmawati.

NIM : 217162020.

Kata Kunci : Akta Jaminan Fidusia, Tanggungjawab Notaris, Pelanggaran-Notaris, Kewajiban Pembacaan Akta.

Isi Abstrak:

Akta jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk autentik berupa akta notaris, dan sebagai persyaratan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij*, yakni akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktik disebut sebagai akta pihak, karena isi dari akta pihak berupa uraian atau keterangan, pernyataan kehendak para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris agar uraian atau keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Maka, notaris dalam hal ini wajib membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan di hadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan pembacaan dan penandatanganan di hadapan notaris sebagai pejabat umum. Permasalahan yang Penulis kaji ialah pengaturan kewajiban pembacaan akta oleh notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia khususnya terhadap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, serta bagaimana akibat hukum dan tanggungjawab terhadap pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak. Tujuan dilakukan penelitian ini dipakai untuk menjawab beberapa permasalahan tersebut. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif dengan analisa data kualitatif - deduksi. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara, serta teknik analisis data menggunakan kualitatif. Akta jaminan fidusia yang kekuatan pembuktiannya terdegradasi berubah menjadi sama seperti akta di bawah tangan, mengakibatkan aktanya tersebut tidak dapat didaftarkan atau pendaftarannya pun berakibat menjadi tidak sah, sehingga sertifikat fidusia yang telah terbit pun turut menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak khususnya kreditur, dimana yang seharusnya sebagai kreditur preferen menjadi kreditur konkuren, serta kreditur pun menjadi kehilangan hak eksekutorialnya dalam mengeksekusi bendanya. Berdasarkan kajian tersebut Penulis merekomendasikan agar sekiranya Pemerintah sebaiknya dapat menetapkan pemberlakuan sanksi ke dalam peraturan terkait pendaftaran jaminan fidusia sehingga perusahaan pembiayaan dapat lebih tertib dan menghindari adanya pelanggaran dalam pembebanan jaminan fidusia.